

AKTIVITAS RUMAH BERSALIN PANTI WANITA KABUPATEN PONOROGO TAHUN 1956-1974

Fahri Ahmad Fadhilah

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Negeri Surabaya
Email: fahriahmad.22007.@mhs.unesa.ac.id

Artono

S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Negeri Surabaya
Email: artono@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji sejarah Rumah Bersalin Panti Wanita di Kabupaten Ponorogo pada tahun 1956–1974. Latar belakang penelitian didasarkan pada kondisi pelayanan kesehatan persalinan pada periode pascakemerdekaan yang masih terbatas. Pada awal 1950-an, negara hanya berfokus pada penataan sistem, sementara kelahiran masyarakat mengalami peningkatan signifikan yang tidak diimbangi ketersediaan fasilitas medis. Masyarakat masih mengandalkan dukun bayi, sehingga layanan proses persalinan masih sangat terbatas. Kehadiran tenaga paramedis dari kalangan Kristen di Rumah Sakit Umum Ponorogo pada akhir 1940-an mendorong terbentuknya persekutuan Kristen yang secara partikelir mendirikan Rumah Bersalin Panti Wanita. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui latar belakang pendirian Rumah Bersalin Panti Wanita pada tahun 1956–1974 serta memahami aktivitas peranannya di dalam institusi dan aktivitas sosiologi kesehatan pada masyarakat di Ponorogo. Metode yang digunakan adalah metode sejarah, meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian Rumah Bersalin Panti Wanita dilatarbelakangi kepedulian persekutuan umat Kristen terhadap keterbatasan akses pelayanan persalinan di Ponorogo pada awal 1950-an. Institusi ini didirikan pada 1956 dan beroperasi dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan. Pelayanan inklusif menjadikan institusi ini memperoleh kepercayaan masyarakat. Perkembangan semakin signifikan sejak 1967 dengan hadirnya tenaga dokter. Pada 1974, melalui Sidang Synode ke 61 pengelolaan Rumah Bersalin Panti Wanita berada di bawah Yayasan Kesehatan GKJW yang sekaligus menjadi tonggak awal puncak kulminasi institusi.

Kata Kunci : Rumah Bersalin Panti Wanita, Umat-Umat Kristen, Pelayanan Bersalin, Kabupaten Ponorogo.

Abstract

This study examines the history of the Panti Wanita Maternity Home in Ponorogo Regency from 1956 to 1974. The background of the study is rooted in the limited availability of maternal health services during the post-independence period. In the early 1950s, the government focused primarily on system reform, while the birth rate among the population saw a significant increase that was not matched by the availability of medical facilities. The community still relied on traditional birth attendants, so maternity care services remained very limited. The presence of Christian paramedical staff at Ponorogo General Hospital in the late 1940s spurred the formation of a Christian fellowship that privately established the Panti Wanita Maternity Home. The objective of this study is to examine the background of the establishment of the Panti Wanita Maternity Home from 1956 to 1974 and to understand its role within the institution and its impact on the sociology of health in the Ponorogo community. The method used is the historical method, which includes heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results of the study indicate that the establishment of the Panti Wanita Maternity Home was motivated by the Christian community's concern regarding the limited access to maternity care in Ponorogo in the early 1950s. This institution was founded in 1956 and operates based on humanitarian principles. Its inclusive services have earned it the trust of the community. Its development has been particularly significant since 1967 with the arrival of medical staff. In 1974, through the 61st Synod, management of the Panti Wanita Maternity Home was placed under the GKJW Health Foundation, marking the beginning of the institution's peak.

Keywords: Panti Wanita Maternity Home, Christian Communities, Maternity Services, Ponorogo Regency.

PENDAHULUAN

Kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia pada era tahun 1950-an tidak dapat dipisahkan dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi pasca kemerdekaan.¹ Dampak sistemik akibat rangkaian konflik selama tujuh tahun mulai dari pendudukan Jepang (1942-1945) hingga Revolusi Indonesia (1945-1949) mengakibatkan kapasitas negara yang tidak terkendali. Mengingat pemerintah kala itu masih dalam tahap memperbaiki stabilitas politik dan dalam negeri. Kondisi tersebut bukan hanya mengabaikan kerusakan terhadap fasilitas publik, namun juga memperburuk penyebaran berbagai penyakit yang tidak dapat tertangani oleh negara yang baru berdiri.

Hal ini tergambarkan dari kurangnya jumlah institusi pelayanan kesehatan yang belum merata dan ketersediaan tenaga medis sangat terbatas. Sebagaimana dipaparkan dalam buku *Public Health and Nation-Building in Soekarno-Era Indonesia*, pada tahun 1955 hanya tercatat sekitar 15.000 tenaga paramedis, 47.000 perawat, dan 1.200 dokter yang harus melayani sekitar 70 juta jiwa masyarakat Indonesia. Perbandingan kapasitas sumber daya tenaga kesehatan yang tersedia tidak sebanding dengan permintaan pelayanan kesehatan masyarakat, menunjukkan bahwa kondisi kesehatan Indonesia mengalami ketimpangan yang signifikan.²

Dari berbagai permasalahan kesehatan, pelayanan persalinan menjadi sektor yang paling rawan, mengingat pada dekade 1950-an, angka kelahiran di Indonesia meningkat secara drastis sementara pelayanan kesehatan bersalin profesional sangat tidak memadai. Penduduk Indonesia pada tahun 1950 berjumlah 77,2 juta. Tingkat kelahiran yang tinggi telah mengakibatkan pertumbuhan penduduk meningkat dengan pesat, dikenal dengan istilah “baby boomers” (ledakan kelahiran bayi).³ Sepanjang tahun 1950, penduduk Indonesia mengalami peningkatan kelahiran anak sebanyak 6,8 jiwa.⁴ Sebagaimana dijelaskan dalam buku “Sejarah Kesehatan Nasional Indonesia Jilid II”, peningkatan angka kelahiran pada periode pasca-perang dipengaruhi oleh tingginya jumlah pasangan yang melangsungkan pernikahan setelah berakhirnya konflik. Selain itu, peningkatan angka kelahiran juga berkaitan dengan kuatnya masyarakat memegang nilai kultur tradisional, seperti “banyak anak, banyak rezeki,” yang kala itu diyakini sebagai sebuah strategi keluarga untuk memperbaiki taraf kondisi sosial dan ekonomi.⁵

Fenomena *baby boomers* pasca perang disertai dengan mewabahnya penyakit menular telah menjadi permasalahan serius di hampir seluruh daerah di Indonesia pada dekade 1950-an, termasuk di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kerusakan fasilitas umum akibat perang, berlangsung secara simultan dengan meluasnya penyakit menular, semakin mempersulit kondisi pelayanan

kesehatan, khususnya pelayanan persalinan. Sehingga masyarakat tidak hanya dihadapkan pada tingginya angka kelahiran, namun juga pada ancaman penyakit yang menular.

Sebagaimana berdasarkan para kesaksian pelaku sejarah, bahwa masyarakat Ponorogo terdampak dalam penyakit yang menular di seluruh lapisan, baik tingkat keadaan parah maupun sedang. Upaya pemerintah dalam mengatasi wabah ini kala itu tidak dapat dilakukan secara optimal, mengingat keterbatasan fasilitas kesehatan serta minimnya tenaga medis yang tersedia. Di sisi lain, seperti kurang adanya fasilitas pelayanan kesehatan bersalin dan keadaan ekonomi kebanyakan masyarakat yang belum stabil pasca agresi militer. Sementara tingkat kesadaran masyarakat Ponorogo pada masa itu masih relatif sangat rendah, oleh karena itu banyak dari mereka masih mengandalkan penanganan tradisional. Akibatnya, mayoritas masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkan proses persalinan kepada dukun bayi yang dianggap lebih terjangkau, baik secara biaya maupun akses.⁶

Sebelum tahun 1950-an, satu-satunya fasilitas kesehatan dan persalinan di Ponorogo hanya ada di Rumah Sakit Umum (RSU) yang ada di Jalan Pemuda (sekarang menjadi SMPN 1 Ponorogo). Sedangkan pada awal 1950-an, pelayanan profesional dalam persalinan baru ada pada tahun 1951 di Rumah Bidan Soedarman. Dua pelayanan kesehatan tersebut tentunya tidak akan memenuhi kebutuhan pelayanan ibu melahirkan di Ponorogo, karena lokasinya berada di pusat kota. Mengetahui itu, maka masyarakat yang berada di luar pusat kota tidak mendapatkan penanganan kelahiran secara profesional, karena akses yang susah dan keberadaan transportasi yang terbatas.⁷

Banyak tenaga kesehatan, khususnya bidan dan mantri yang bekerja di Rumah Sakit Umum Ponorogo merupakan umat Kristen. Interaksi profesional yang terjalin di antara mereka berkembang menjadi relasi kolegal, kemudian melahirkan Persekutuan Umat Kristen Jawi Wetan di pusat Kota Ponorogo. Pada dekade 1950-an, kondisi pelayanan kesehatan di Ponorogo masih tergolong sangat buruk. Kesadaran akan kebutuhan tersebut mendorong jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Ponorogo untuk merencanakan penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Upaya ini secara gotong-royong terlaksanakan dengan berdirinya Rumah Bersalin Panti Wanita milik persekutuan pada 1 Juni 1956.⁸

Sebagai acuan penelitian terdahulu penulis mencantumkan karya dari penulisan skripsi yang berjudul “Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Jemaat Ponorogo Tahun 1959-2023” tahun 2025 yang ditulis oleh Khoirul Nizam. Skripsi ini membahas mengenai dinamika GKJW Pasuruan Ponorogo secara universal dari awal pendirian

¹ Neelakantan, V. Science, “Public Health and Nation-Building in Soekarno-Era Indonesia”, hlm, (2017) 1-3.

² Departemen Kesehatan RI, “Sejarah Kesehatan Nasional Indonesia, Jilid I”, (Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1980), hlm. 147.

³ ibid, hlm. 68

⁴ Rajagukguk, W., dan B. O. “Samosir, Dinamika Demografi Indonesia 1950-2100” (Jakarta:2015), hlm. 1.

⁵ Bid., hlm. 27-28.

⁶ Kuntowijoyo, “Babad Ponorogo, Jilid IV” (Ponorogo: 1984), hlm. 29.

⁷ Rumah Sakit Umum Darmayu, “Profil Rumah Sakit Umum Darmayu”, (Ponorogo: Rumah Sakit Umum Darmayu, 2018).

⁸ Noerseto, C. “Hari Ulang Tahun Ke 30 GKJW Ponorogo”, (Ponorogo: 1989), hlm.6.

hingga zaman kontemporer. Skripsi ini juga memberikan penjelasan mengenai kondisi persekutuan umat GKJW pada rentang tahun 1960-1970-an.

Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada batasan temporalnya, pembahasan pada skripsi ini lebih berfokus pada perkembangan GKJW Ponorogo 1959-2023 dan pembahasan lebih banyak dijelaskan pada era 1990-an sampai tahun 2000-an. sedangkan fokus penelitian penulis berawal sejak tahun 1956 sampai 1974. Dalam skripsi ini hanya sekilas membahas pendirian Panti Wanita serta lebih mengkaji pada zaman kontemporer yaitu pada rentang tahun 1980-1990, *gap* yang tidak dikaji tersebut sehingga menjadi fokus penelitian penulis. Dalam melakukan penelitian, penulis lebih mendalami terkait hirarki, struktur, dan umat-umat Kristen Ponorogo yang berperan aktif memberikan kontribusi terhadap Rumah Bersalin Panti Wanita, baik dalam proses pendirian maupun ketika telah melakukan aktivitas operasionalnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti sejarah Rumah Bersalin Panti Wanita. Posisi Rumah Bersalin Panti Wanita sekarang bertransformasi menjadi rumah sakit yang bernama "Griya Waluya" sudah berperan aktif sejak tahun 1956 atas kesadaran persekutuan yang sebagian besar berprofesi sebagai bidan dan mantri. Reputasi Panti Wanita juga telah melekat pada kolektif masyarakat, "kalau di Panti Wanita pasti akan cepat tertangani!" Menunjukkan sugesti positif dan tingkat kepercayaan terhadap kualitas pelayanannya.

Menariknya, sejak awal pelayanan di era direktur Bidan Bingar, Rumah Bersalin Panti Wanita bersifat non-profit dan berorientasi pada pengabdian sosial bagi masyarakat tanpa memandang ras, suku, dan golongan. Keunikan juga tergambarkan pada pelayanan terhadap santri-santri Pondok Gontor Ponorogo mempercayakan Rumah Bersalin Panti Wanita sebagai tempat berobat dan bentuk pelayanan kemanusiaan dengan menggratiskan masyarakat yang kurang mampu.

Pada tahun 1974 Rumah Bersalin Panti Wanita terintegrasi bergabung secara resmi menjadi bagian Greja Kristen Jawi Wetan yang terbentuk sebuah Yayasan Kesehatan (YK-GKJW). Proses integrasi membawa perubahan yang bersifat sistematis dan berkelanjutan, di mana yayasan berperan sebagai payung fasilitator dan mediator yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan aspek kelembagaan maupun operasional Rumah Bersalin Panti Wanita.

Peristiwa tersebut menandai fase awal transformasi institusi yang menjadi landasan bagi perkembangan, lebih lanjut pada tahun-tahun berikutnya. Proses diakuisisi institusi menunjukkan karya nyata pelayanan kesehatan yang memberikan pengaruh luas yang mampu dicintai oleh masyarakat tanpa adanya konflik, sehingga keberadaannya dinilai sejalan dengan nilai-nilai pelayanan diusung oleh GKJW. Mengetahui tersebut, penulis tertarik untuk meneliti aktivitas Rumah Bersalin Panti Wanita.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan fokus permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah rangkaian teknik yang digunakan

untuk mengadakan penelitian terhadap data dan fakta bersifat objektif, bertujuan agar sesuai dengan prinsip pada tujuan penelitian, yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Terdapat empat langkah-langkah rangkaian dalam prosedur penelitian yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.⁹

Heuristik merupakan tahap pertama dalam penelitian sejarah, seorang penulis dalam melakukan penelitiannya harus melakukan pengumpulan sumber-sumber yang berkaitan dengan peristiwa sejarah yang akan diteliti. Dalam metode ini penulis berusaha mencari sumber-sumber arsip berupa dokumen, kesaksian pelaku sejarah, dan data sebagai penunjang penelitian penulis. Pengumpulan data dokumen tersebut dilakukan di Rumah Sakit Griya Waluya Ponorogo, Rumah Bersalin Panti Wanita cabang Siman, Rumah Sakit Mojowarno Jombang, Greja GKJW Pasuruan Ponorogo, Rumah Sakit Umum Dokter Harjono Ponorogo, Perpustakaan Kabupaten Ponorogo, Kearsipan Universitas Duta Wacana Jogjakarta, Dinas Kearsipan Kabupaten Ponorogo, Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, Perpustakaan Universitas Mupo, Majelis Agung GKJW Malang, Rumah Sakit Reksa Waluya Mojokerto, Sekolah Kebidanan Griya Husada Surabaya, Universitas Duta Wacana, Yogyakarta, Jogja Library Center, Perpustakaan Kota Jogjakarta, Diorama Arsip Jogja, Perpustakaan Universitas Airlangga, Perpustakaan Sejarah UGM, Perpustakaan Fakultas Kedokteran UGM, Perpustakaan Sejarah UNY, Digital Lab UNY, Dinas Kearsipan, Perpustakaan Solo, Monumen Pers Solo, Rumah Mini Arsip Babad Ponorogo, Kodim 0802 Ponorogo, Dinas Pertanian Ponorogo, Dinas Kesehatan Ponorogo, Dinas Kesehatan Jawa Timur, Badan Statistik Jawa Timur, BKKBN Jawa Timur, Museum Radya Pustaka Solo, dan Perpustakaan Medayu Agung Surabaya. Jumlah pencarian sumber fisik selama penelitian dilakukan sebanyak 31 kali kunjungan.

Sedangkan sumber *oral history*, penulis melakukan pencarian di Ponorogo, dengan fokus Rumah Bersalin Panti Wanita: Rumah Endang (89 tahun, petugas pencatat pasien 1967), Mariyati (76 tahun, juru rawat tahun 1966, 1 kali kunjungan dan 10 kali wawancara gawai), Harno (75 tahun, juru rawat tahun 1966, dua kali kunjungan), Dameria Hutanggalung (anak Bpk/Ibu Hutanggalung sebagai tokoh pendiri), Christian Noerseto (66 tahun, penulis sejarah GKJW Ponorogo dan saksi), Sri Prihatin (89 tahun, juru rawat tahun 1961 dan sebagai pasien tahun 1974, 4 kali kunjungan), Solon Panggabean (71 tahun, pasien yang melahirkan 9 kali tahun 1956-1974), dan Sukadi (Pembina laboratorium). Sedangkan di Tulungagung penulis menemui Katirin (67 tahun, anak dari petugas dapur cabang Siman dan tinggal di cabang Siman sejak tahun 1969).

Sementara, untuk memenuhi sumber penelitian terkait kondisi kesehatan, sosial, dan politik Kabupaten Ponorogo, penulis melakukan *oral history* dengan, Sukadi (89 tahun, tiga kali kunjungan), Moen (2 kali kunjungan) Endang Sulastri (mantan Bendahara Dinkes Ponorogo tahun 1979), Tukiye (69 tahun, 2 kali kunjungan), Sri (bidan 1980), Ipuk, Moen (69 tahun), Kateni (69 tahun), Kemis (83 tahun), Guritno (81 tahun), Jimun (74 tahun),

⁹ Kuntowijoyo. "Pengantar Ilmu Sejarah" (1990), hlm. 90.

Jimun (79 tahun), dan Bapak Khoiri (81 Tahun). Meninjau dari hasil wawancara, tidak semua dituliskan. Mengingat informasi yang sudah disampaikan banyak saksi/pelaku maupun penulis tidak menemukan informasi yang tepat untuk mengisi kekosongan pada penelitian.

Jumlah pelaku dan saksi secara keseluruhan adalah 22 orang. Dengan pelaku/saksi yang terlibat langsung dengan objek penelitian sebanyak 9 orang. Sedangkan pelaku/saksi untuk memperkuat latar belakang penelitian berjumlah 15 orang. Seluruh narasumber merupakan pelaku maupun saksi sejarah sezaman yang memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian ini. Narasumber tersebut mencakup pensiunan juru rawat, petugas administrasi, serta pasien tetap yang pernah melahirkan sembilan anak di Panti Wanita pada periode 1957–1973.

Selain itu, turut diwawancarai seorang pengamat sejarah GKJW Ponorogo yang juga menjadi saksi aktivitas Rumah Bersalin Panti Wanita, serta keluarga dekat para pelaku sejarah, meliputi anak kandung pendiri, anak kandung bidan, anak dari staf dapur, dan anak dari juru rawat yang pada masa itu hidup dan tinggal di lingkungan Rumah Bersalin Panti Wanita. Dengan demikian, para narasumber memiliki pengalaman langsung maupun pengetahuan otentik mengenai aktivitas kehidupan Rumah Bersalin Panti Wanita pada periode 1956–1974. Adapun sumber digital dalam penelitian dilakukan pencarian di Delpher, Jstor, Avantara, Kitlv, Sidak Arsip, Sinta, Anri Online, Laman UKDW, Google Scholar, Antara, Larissa, dan repository di berbagai universitas.

Tahap kedua adalah Kritik atau Verifikasi sumber merupakan kegiatan analisis terhadap sumber sejarah, agar mendapatkan kredibilitas setelah penulis melakukan kegiatan heuristik. Adanya kritik sumber bertujuan untuk memfilter secara kritis guna mendapatkan keabsahan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Pada penelitian ini penulis menggunakan dua kritik sumber. Kritik intern adalah kritik yang dilakukan dengan cara mendalami dokumen yang sezaman, mengetahui penulis dalam buku yang dijadikan referensi, dan pelaku sejarah yang akan diwawancarai bertujuan agar memperoleh data yang akurat, Kritik ekstern adalah pengujian bahan, tinta, dari data yang diperoleh. Penulis melakukan seleksi sumber untuk mengetahui dari mana sumber itu didapatkan, apakah dari sebuah lembaga atau perorangan yang dapat dipertanggung jawabkan kredibilitasnya.

Tahap ketiga adalah interpretasi yang merupakan tahap penafsiran dari sumber yang telah didapatkan. Penafsiran dilakukan terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh. Pada saat melakukan penafsiran, seorang peneliti harus melakukan analisis dengan memusatkan titik perhatian penelitiannya sesuai dengan kajian ilmiah yang diharapkan, agar penulisan sejarah akan lebih bersifat objektif. Dalam penafsiran ini, peneliti menghubungkan keterkaitan antara sumber. Penulis menginterpretasikan hubungan sejarah dengan ilmu sosial, kesehatan, dan ekonomi terkait sejarah yang diteliti.

Tahap terakhir adalah Historiografi merupakan tahap akhir yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian

sejarah. Historiografi adalah bentuk merekonstruksi penulisan alur cerita sejarah yang didapatkan selama penelitian, dengan menyajikan hasil data sebaik mungkin, sehingga fakta sejarah yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya Rumah Bersalin Panti Wanita

Sebagaimana yang telah disampaikan pada penelitian sebelumnya, tatanan kesehatan di Ponorogo sudah buruk telah berlangsung selama bertahun-tahun. Keadaan tersebut juga dijelaskan dalam kesaksian Suratman, menyampaikan sejak pendudukan Jepang hingga tahun 1950-an masih mengalami kesusahan yang sama.¹⁰ Sejalan pada penelitian Baha Udin, berjudul, “Kebijakan kesehatan masyarakat berbasis pedesaan di Indonesia pasca kemerdekaan (1951–1974). Menyatakan, minimnya anggaran negara, tidak banyak program dan kebijakan kesehatan yang bisa dilakukan, terutama pada tahun 1945-1950.

Meski demikian, di Kabupaten Ponorogo angka kelahiran terus mengalami peningkatan. Kondisi ini juga dijelaskan dalam catatan koran *Pewarta Sorabaia*, menyatakan: *Tambahan penduduk Ponorogo 20 ribu, mengharuskan peninjauan ke Daerah Kabupaten Ponorogo yang telah ditunggu sejak lama oleh Bupati Ponorogo, kepala Kepolisian, dan tentara*. Informasi ini mengindikasikan, bahwa upaya kebijakan pemerintah dari pusat dalam mengatasi kelahiran di Ponorogo telah mengalami keterlambatan. Data yang tertulis dalam surat kabar merupakan jumlah penambahan penduduk Ponorogo tahun 1950, sedangkan peninjauan dari pemerintah baru akan dilaksanakan pada 17 Desember 1957.

Sementara pelayanan profesional di Ponorogo hanya ada di tiga institusi saja. Dalam surat kabar *Nieuwe Courant*, institusi kesehatan pemerintah di Ponorogo pada awal tahun 1950 hanya ada tiga, yaitu Rumah Sakit Umum Pemuda, Palang Merah (PMI), dan Departemen Kesehatan Tentara (DKT).¹¹ Namun periode tahun 1950-an, PMI masih terlibat konflik dualisme perhimpunan, sehingga pelayanan kesehatan tidak terlaksana dengan baik.¹²

Fasilitas bersalin pelayanan profesional tahun 1950-an awal hanya ada di Rumah Sakit Umum di Jalan Pemuda, yang tentunya tidak dapat melayani persalinan masyarakat secara menyeluruh. Di tengah-tengah banyaknya kelahiran bayi di Ponorogo, masyarakat hanya mendapatkan pelayanan persalinan yang dibantu oleh dukun bayi. Namun, dukun bayi yang tidak dibekali ilmu medis hanya melayani proses melahirkan secara tradisional. Sukadi menjelaskan: “Serba kesusahan, akses kesehatan profesional tidak ada, penanganannya hanya mengandalkan dukun bayi yang minim pengetahuan medis.”¹³

Menunjukkan kondisi kesehatan masyarakat dan fasilitasnya sangat terdegradasi, bahkan pemerintah pusat mengalami keterlambatan dalam penanganan *baby boom* di Ponorogo. Mengetahui kebijakan kesehatan dari pemerintah yang tidak terlaksana secara holistik,

¹⁰ Wawancara Suratman 26 Desember 2026.

¹¹ “*Orientatie te Madioen*”. (*Nieuwe Courant*: 1949), hlm. 1.

¹² Wawancara Sukadi, Ponorogo, 21 Agustus 2025.

¹³ Wawancara Sukadi. Loc. Cit.

menjadikan “organisasi” atau “kelompok” bergerak untuk mengabdikan penuh terhadap masyarakat secara independen, dikenal dengan istilah “partikelir”.

Paramedis yang terdiri dari bidan dan mantri di Ponorogo kebanyakan merupakan umat beragama Kristen sehingga mereka berkumpul untuk menjadi sebuah satu persekutuan. Pada Agustus tahun 1952 persekutuan umat berjumlah 12 keluarga, dibawah Pendeta Noetriyo statusnya meningkat menjadi persekutuan “Pepanthan” dengan kegiatan keagamaan menetap berada di rumah Keluarga Soedoyo.¹⁴ Perkembangan persekutuan umat yang di dominasi oleh tenaga kesehatan tersebut mendorong lahirnya inisiatif mendirikan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam bentuk rumah bersalin.¹⁵

Christian Noerseto selaku penulis buku sejarah GKJW Ponorogo mengungkapkan: “Ketika saya ditunjuk sebagai ketua penulis sejarah Persekutuan GKJW Ponorogo, saya menemui banyak para sesepuh dan tokoh pendiri seperti Bu Soedarman, Soedir Rekso, dan Soeroyo. Keinginan pendirian rumah bersalin diawali ketika saat melakukan Kebaktian Minggu. Setelah melakukan ibadah, mereka mengobrol, hingga terdapat sebuah diskusi ringan untuk mendirikan rumah bersalin. Mereka sebagai tenaga kesehatan Ponorogo semua. Namun, kondisi kesehatan Ponorogo masih buruk. Kala itu Rumah Sakit Umum Pemuda sangat penuh dengan pasien, oleh karena itu ayo kita membangun rumah bersalin.”¹⁶

Keinginan tersebut tidak berhenti sebagai bahan diskusi ringan. Inisiatif mulai dipraktekkan ketika pada era Pendeta Loemadyo Marmer tahun 1954, Umat GKJW semakin bertambah menjadi 20 keluarga, sehingga komitmen mendirikan rumah bersalin semakin menguat dan proses pendirian rumah bersalin disiapkan secara serius.¹⁷

Maka, pada awal tahun 1954 dibentuk panitia pendirian rumah bersalin yang diketuai oleh Bapak Alexander Hutanggalung. Perencanaan fisik serta pemenuhan pengurusan administrasi, dipersiapkan secara sistematis dan matang. Pada sekitar tahun 1954-1956 pertengahan Bapak Hutanggalung ditemani dengan Bapak Matias Yusuf selaku seorang polisi berangkat ke Jakarta mengurus izin kepada Johannes Leimena sebagai Menteri Kesehatan.¹⁸ Izin pendirian rumah bersalin berhasil disahkan pada 20 Maret 1956.¹⁹

Tabel 1.1 Struktur Panitia Pembangunan Rumah Bersalin Panti Wanita 1954-1956.²⁰

JABATAN	NAMA
Ketua	Bpk. Alexander Hutanggalung
Wakil Ketua	Bpk. Soedoyo Raharjo
Sekretaris	Bpk. Winoto
Bendahara	Ny. Sitompul
Pembina	Bpk. Lomadyo Marmer
Anggota	Bpk. Soedarman Dharmoatmojo
Anggota	Somoprawiro

Sumber: Buku Hari Ulang Tahun GKJW ke 30.

Sebagai persekutuan yang masih merintis, kondisi finansial hanya mampu menopang kehidupan pendeta dan keluarganya, sehingga pengelolaan belum mampu membangun gedung. Maka, aktivitas institusi dilakukan dengan cara menyewa rumah joglo milik juragan batik muslim bernama Bapak Haji Dimiyati²¹ di Jalan Sultan Agung nomor 37 Ponorogo.²²

Pernyataan ini diperkuat dari kesaksian Christian Noerseto, ketika ia melakukan wawancaranya tahun 1989 dengan Bapak Soeroyo, Bapak Sudirekso, Ibu Soedarman, dan Ibu Bingar selaku pendiri Rumah Bersalin Panti Wanita, bahwa masyarakat lingkungan sekitar secara sertaina ikut membantu pendirian rumah bersalin.²³ Setelah persiapan panjang, rumah bersalin secara resmi didirikan pada 1 Juni 1956 dengan nama “Rumah Bersalin Panti Wanita”.²⁴

Epistemologis dari nama ‘Panti Wanita’ merupakan gabungan dari dua arti kata. Istilah “Panti” bermakna tempat atau wadah pelayanan, sedangkan “Wanita” merujuk pada perempuan. Dalam konteks ini, nomenklatur tersebut mengacu pada fungsi institusi sebagai tempat pelayanan bagi perempuan, khususnya ibu hamil dan melahirkan.²⁵ Penulisan “Panti Wanita” pada awalnya menggunakan tanda diakritik pada huruf “a” yang secara fonetik dibaca “Panti Wanito”. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara bentuk ortografis dan pelafalan sebagai bagian dari adaptasi linguistik dalam pengaruh bahasa Jawa.

¹⁴ Tim Penyusun Sejarah GKJW Ponorogo. Op. Cit, hlm. 2.

¹⁵ Ibid. Dalam perkebangannya, ibdah Minggu pada tahun 1954-1958 dilakukan di ruangan SMPN Ponorogo. Persekutuan GKJW Ponorogo baru mendirikan Gereja pada tahun 1963.

¹⁶ Wawancara Christian Noerseto. Ponorogo, 06 September 2025.

¹⁷ Buku Laporan Rumah Bersalin Panti Wanita Tahun 1999, hlm.1.

¹⁸ Penulis tidak menemukan catatan tertulis terkait keberangkatan Bapak Alexander Hutanggalung dengan Bapak Matias Yusuf ke Jakarta. Kondisi ini sehingga penulis hanya menuliskan rentang tahunnya saja (1954-1956 pertengahan).

¹⁹ Ibid.,

²⁰ Buku Laporan Rumah Bersalin Panti Wanita Tahun 1999.

Loc. Cit.

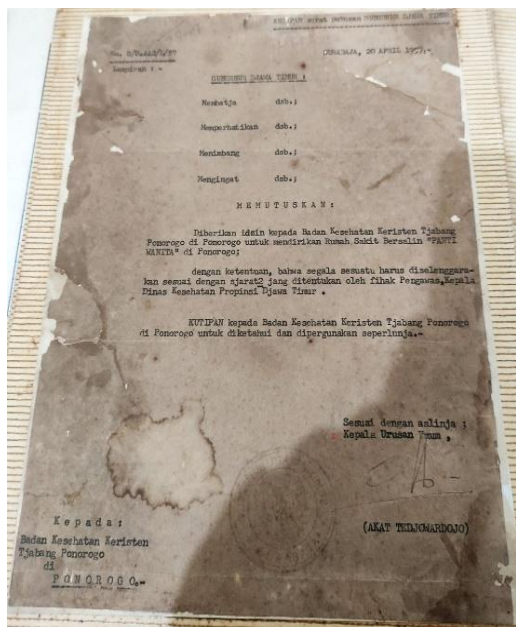
²¹ Berdasarkan Wawancara C. Noerseto dengan Ibu Soedarman, biaya sewa dikumpulkan dengan cara iuran oleh para pendiri Rumah Bersalin Panti Wanita.

²² Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan Mengenai Peningkatan status Rumah Bersalin Panti Wanita menjadi Rumah Sakit Gawat Darurat dan Khusus Bedah Tahun 1996.

²³ Wawancara Christian Noerseto. Loc. Cit.

²⁴ Tim Penyusun Sejarah GKJW Ponorogo. Loc. Cit.

²⁵ BPH Majelis Agung GKJW, “Peringatan 50 Tahun MA GKJW”, (Malang: BPH Majelis Agung GKJW, 1981), hlm.220.



Gambar 1.1. Surat Putusan Gubernur Pendirian Rumah Bersalin Panti Wanita, 20 April 1957. Sumber: Koleksi Arsip Greja GKJW Ponorogo.

Dengan surat izin pendirian dari putusan Gubernur pada 20 April 1957 dengan No. 0/U.442/I.57. 26 tersebut menandakan bahwa Rumah Bersalin Panti Wanita telah berdiri secara independen, artinya murni merupakan perjuangan kelompok sendiri dan bukan bantuan langsung dari Protestan (GKJW). Hal ini juga dijelaskan dalam buku, “Sejarah Rumah Sakit Mojowarno”, bahwa banyak institusi-institusi kesehatan yang telah berdiri sendiri, maka, Yayasan Greja Kristen Jawi Wetan tidak memiliki hak untuk ikut mengatur segala aktivitas operasionalnya.²⁷

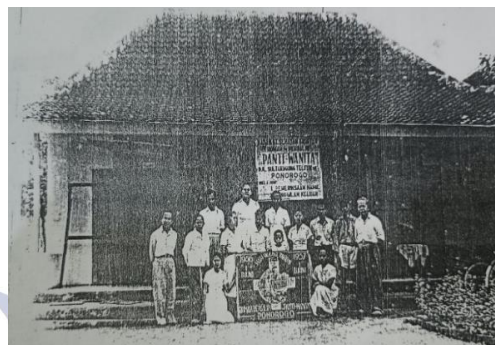
B. Aktivitas Institusi Rumah Bersalin Panti Wanita 1956-1974

1. Masa Direktur Bidan Bingar 1956-1966

Rumah Bersalin Panti Wanita merupakan institusi pelayanan kesehatan yang berfokus pada persalinan serta kesehatan ibu dan anak. Pada fase awal pendirian, struktur kepengurusan Rumah Bersalin Panti Wanita belum terbentuk secara terorganisir, sehingga belum memiliki tenaga kerja tetap. Sebagaimana temuan Christian, para tokoh pendiri yang merupakan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Ponorogo secara sukarela bergantian memberikan pelayanan tanpa menerima imbalan.²⁸

Pada awal aktivitas operasionalnya, Rumah Bersalin Panti Wanita telah menjadi perhatian masyarakat yang menarik banyak pasien. Dalam kapasitasnya sebagai petugas pencatat pasien, Endang menjelaskan bahwa tahun 1957 kunjungan pasien bersalin dalam satu hari pernah mencapai 40 orang. Menurut keterangannya, tingginya pasien bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan fasilitas

di Ponorogo, akan tetapi kualitas juga memberikan pengaruh besar dari peran institusi. Sejak awal, institusi ini sudah memiliki pelayanan kunjungan pasien yang kala itu masih tergolong unik memberikan atraktif bagi masyarakat. Selain itu, figur Bidan Bu Bingar terkenal sangat sabar menjadi daya tarik masyarakat.²⁹



Gambar 1.2. Rumah Bersalin Panti Wanita Tahun 1957. Sumber: Buku 30 Tahun GKJW Ponorogo, hlm. 27.

Interaksi kolega yang kuat dengan Rumah Bersalin Soedarman juga memberikan pengaruh optimal. Institusi ini sudah berdiri sejak tahun 1952 dan memiliki banyak pasien.³⁰ Mengingat pemilik Rumah Bersalin Soedarman yang juga merupakan tokoh pendiri Institusi Panti Wanita, khususnya Ibu Soedarman, berperan aktif dalam membantu aktivitas pelayanan secara langsung maupun mengirimkan tenaga kerjanya ke institusi. Bahkan, adiknya bernama Prapriningsih juga sebagai bidan di Institusi Panti Wanita pada akhir tahun 1960-an. Relasi ini juga turut membangun branding institusi Panti Wanita kepada masyarakat Ponorogo.³¹ Mengingat, pada saat itu, mendirikan institusi kesehatan di Ponorogo tahun 1950-an harus menghadapi banyak resiko seperti institusi bersalin lain yang mengalami kebangkrutan pada era ini.³²

Praktisnya, Rumah Bersalin Panti Wanita sejak awal langsung menjadi pusat sorotan disebabkan dari kualitas pelayanannya yang unik, serta memiliki relasi kuat dengan Rumah Bersalin Soedarman. Meski jarak institusi ini dengan Rumah Bersalin Panti Wanita hanya sekitar satu kilometer saja, dengan adanya kesatuan telah memberikan kekuatan yang saling melengkapi.

Guna mengontrol dan menata aktivitas operasional institusi lebih profesional, diperlukan direktur berpengalaman dalam pengelolaan lembaga kesehatan. Rumah Sakit Mardi Santosa Surabaya—yang juga institusi milik GKJW, mengirimkan seorang tenaga bidan profesional bernama Bu Bingar asli dari Mojowarno yang membantu pelayanan Rumah Bersalin Panti Wanita. Sejak awal kedatangannya, ia langsung ditunjuk sebagai *direktis* (sebutan direktur pada masa lalu).³³

²⁶ Surat Putusan Gubernur Pendirian Rumah Bersalin Panti Wanita pada 20 April 1957.

²⁷ Panitia Peringatan 100 Tahun RSK Mojowarno. “Sejarah Rumah Sakit Kristen Mojowarno”, (1994), hlm. 195.

²⁸ Noerseto, C. “Hari Ulang Tahun Ke 30 Pahamuwan GKJW Ponorogo”. (1989), hlm. 5.

²⁹ Wawancara Endang. Ponorogo, 14 Agustus 2025.

³⁰ Rumah Sakit Umum Darmayu, *Profil Rumah Sakit Umum Darmayu* (Ponorogo: Rumah Sakit Umum Darmayu, 2018).

³¹ Wawancara Sri Prihatin. Ponorogo, 11 Agustus 2025.

³² Penulis tidak dapat menyebutkan nama-nama institusi demi memenuhi kode etik.

³³ Ibid, hlm. 4-5.



Gambar 1.3. Bidan Bingar Direktur 1956-1966.

Sumber: Arsip Rumah Sakit Griya Waluya.

Sebagai bidan lulusan dari sekolah kesehatan Mardi Santosa zaman Kolonial Belanda, kehadiran Bu Bingar memberikan pengaruh pada peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan persalinan di institusi. Figur Ibu Bingar terekam dalam berbagai kesaksian, sebagai sosok perempuan bertumbuh tinggi.

Sebagaimana dalam ingatan Mariyati:

“Dulu Bu Bingar kerap memanggil ‘jeng’ kepada kami. Ia sangat tegas kepada para pekerjanya, namun kalau sama pasien sabar sekali.”³⁴

Penelitian dari Christian Noerseto, juga menunjukkan, bahwa kepengurusan awal Rumah Bersalin Panti Wanita terdiri atas Bapak dan Ibu Sitompul, Ibu Soedarman, Ibu Soedoyo, dan Loemadyo Marmer.³⁵ Tidak berselang lama setelah kedatangan Bidan Bingar, institusi baru membuka lowongan tenaga kesehatan.³⁶ Pada awalnya, lowongan pekerjaan institusi Panti Wanita mengutamakan tenaga paramedis dan juru rawat dari umat Greja.³⁷

Kesaksian situasi juga diungkapkan oleh Endang, petugas pencatat pasien 1957, mengatakan: “Pada awal kerja, saya hampir tidak pernah menerima upah, kita bekerja dengan rasa empati yang tinggi. Mendapatkan gaji saat pasien ramai, dengan upah tidak tetap atau disebut sebagai sukuhan.”³⁸

Perkembangan terkait upah baru direncanakan pada tahun 1959. Sebagaimana peraturan dalam Proposal Rencana Pengembangan Rumah Bersalin Panti Wanita Ponorogo, menyatakan: *Tenaga paramedis diambil dari warga Greja yang bersedia membantu pelayanan. Sedang perawat dari warga Greja atau yang lain yang bersedia dengan gaji/imbilan menurut kesanggupan unit. Ini semua sudah dilakukan sejak tahun 1959.*³⁹

Pada era ini, bidang pekerjaan terdiri dari bidan, juru rawat, pencatat pasien, tugas dapur, pencuci pakaian dan berkolaborasi dengan tukang becak. Sedangkan, sistem jam kerja pegawai di Rumah Bersalin Panti Wanita terbagi menjadi tiga shift, pertama jam 07.00-14.00, kedua jam 14.00-21.00, dan ketiga jam 21.00-07.00.⁴⁰ Total jumlah pegawai Rumah Bersalin Panti Wanita hingga tahun 1966 sebanyak 14 orang.⁴¹

Pada awal pendirian, aktivitas Rumah Bersalin Panti Wanita telah menjadi daya tarik dari berbagai kalangan masyarakat Ponorogo. Kesaksian dari Endang mengatakan sejak tahun 1957, banyak tokoh-tokoh “terkemuka” di Ponorogo yang menjadi pelanggan di Rumah Bersalin Panti Wanita.

Sebagaimana kesaksian Sri Prihatin, sebelum tahun 1960-an, isteri dari juragan-juragan batik Ponorogo banyak yang melakukan proses persalinan di rumah bersalin.⁴² Pasien kalangan atas di Rumah Bersalin Panti Wanita terus berlangsung hingga enam dekade selanjutnya. Sedangkan pasien kalangan menengah ke bawah, merujuk pada pelaku sejarah bernama Harno sebagai juru rawat Rumah Bersalin Panti Wanita, banyak pasien dari kalangan bawah yang tidak mampu membayar. Mengingat institusi merupakan pelayanan kemanusiaan, pasien yang kurang mampu akan tetap dilayani hingga akhir.

Tabel 1.2. Jumlah Kelahiran Pasien RB. Panti Wanita Tahun 1962-1966.

Tahun	Kelahiran di RB. Panti Wanita
1962	633
1963	682
1964	303
1965	418
1966	465

Sumber: Buku Laporan Pasien RB. Panti Wanita 1962-1966 dan Buku BPS Ponorogo tahun 1984.

Laporan pasien melahirkan sejak tahun 1956-1961 tidak ditemukan oleh penulis, sehingga gambaran keramaian pasien di Rumah Bersalin Panti Wanita hanya terbatas pada kesaksian sejarah. Laporan jumlah pasien melahirkan baru ditemukan pada tahun 1962-1966 yang telah melayani sebanyak 2.501 kelahiran. Pada era 1960-an tersebut dapat diketahui bahwa pasien Rumah Bersalin Panti Wanita cenderung menurun. Kondisi itu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, Pertama, pada tahun 1964 Ponorogo mengalami puncak peristiwa “larang pangan”. Kondisi ekonomi masyarakat yang sangat terpuruk menyebabkan kelaparan terjadi di berbagai daerah Ponorogo. Lebih jauh, menurut Sukadi, masyarakat yang kondisi perekonomian yang kurang akan memilih proses melahirkan kepada dukun bayi. Kedua, pada tahun

³⁴ Wawancara Mariyati. Loc. Cit

³⁵ Ibid.,

³⁶ Ibid.,

³⁷ Rumah Sakit Griya Waluya. *Proposal Rencana Pengembangan Rumah Bersalin Panti Wanita Ponorogo* (1992), hlm. 2.

³⁸ Wawancara Endang. Loc. Cit.

³⁹ Rumah Sakit Griya Waluya (1992). Loc. Cit.

⁴⁰ YK-GK/JW, Peraturan Pokok Ketenagaan (1985), Bagian Kedelapan Belas: Lembur dan Upah Lembur, Pasal 21 ayat (1), hlm. 19.

⁴¹ *Daftar Tenaga Kerja Rumah Bersalin Panti Wanita Tahun 1973*. (Ponorogo: Rumah Bersalin Panti Wanita, 1974).

⁴² Wawancara Endang. Loc. Cit.

1965, dinamika politik yang berada pada titik krusial yaitu terjadinya “G30S PKI”. Peristiwa itu mengakibatkan pada penurunan pasien Rumah Bersalin Panti Wanita.

Pada tahun 1966-1967 menjadi titik awal perkembangan pasien, namun angka pasien tidak sebesar tahun 1962-1963. Penulis memberikan hipotesis, bahwa kondisi itu dipengaruhi oleh mulai berkembangnya kembali Rumah Bersalin ‘Aisyiyah dan Detasemen Kesehatan Tentara (DKT) Ponorogo. Kedua institusi tersebut masih berada dalam area kota, yang jaraknya kurang dari tujuh kilo meter dari Rumah Bersalin Panti Wanita, mengakibatkan terbaginya beberapa pasien beralih di Institusi ‘Aisyiyah dan DKT Ponorogo.

Perkembangan selanjutnya terjadi Pada 24 Juli 1963, Rumah Bersalin Panti Wanita melebarkan cabangnya di Kecamatan Siman. Peletakan batu pertamanya dilaksanakan jam 13.30 serta disaksikan oleh Camat Siman, jajaran pengurus Rumah Bersalin Panti Wanita, dan tokoh-tokoh GKJW Ponorogo.⁴³ Pada Oktober 1963 pembangunan diberhentikan, mengingat kondisi Ponorogo pada era tahun itu mengalami masa larangan.

Pembangunan dilakukan kembali pada 1 April 1965 yang dibantu oleh Yayasan Dana Bantu Daerah. Aktivitas Rumah Bersalin Panti Wanita Siman resmi beroperasi pada 1 Juni 1965 bersamaan dengan ulang tahun Rumah Bersalin Panti Wanita Ponorogo.⁴⁴ Dengan satu mantri tetap bernama Bapak Hutanggalung dan satu bidan tetap bernama Ibu Hutanggalung. Sedangkan tenaga medis didatangkan satu bidan dan empat juru rawat dari Institusi Panti Wanita Jalan Sultan Agung (pusat) setiap dua Minggu sekali.⁴⁵

2. Masa Direktur Dokter Soejadmoko 1967-1974

Selama 11 tahun aktivitas pelayanan persalinan di Rumah Bersalin Panti Wanita, telah memberikan pengabdian bagi masyarakat Ponorogo, pada 1 Maret 1967 berdasarkan bantuan dari Badan Kesehatan Kristen melalui Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Jawa Timur. Rumah Bersalin Panti Wanita mendapatkan tenaga dokter bernama Soejadmoko.⁴⁶ Guna mempertahankan mutu pelayanan medis, selanjutnya Dokter Soejadmoko diangkat menjadi direktur baru.⁴⁷ Kedatangan ini turut mengawali babak lebih besar kemajuan institusi Panti Wanita.

Kedatangan Dokter Soejadmoko tertuang dalam Peraturan Pokok Ketenagaan Kesehatan GKJW. Pada Pasal 21 bagian Keduabelas, tentang Kenaikan Pangkat Istimewa. Bahwa tenaga kerja yang jabatannya lebih tinggi serta memiliki prestasi, dedikasi, dan loyalitas tenaga kerja akan mendapatkan promosi jabatan. Soejadmoko sebagai dokter yang masih muda, memberikan pengaruh progresif bagi perkembangan rumah bersalin. Sejak pertengahan tahun 1967, Rumah Bersalin Panti Wanita melebarkan pelayanan terhadap kesehatan ringan

masyarakat umum.

Perkembangan tersebut menghadirkan gelombang kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Rumah Bersalin Panti Wanita memiliki dua pelayanan utama. Sebelumnya, Bu Bingar sebagai figur bidan bersalin paling ikonik di Ponorogo. Dengan hadirnya Dokter Soejadmoko memberikan figur ikonik terkait penanganan kesehatan yang paling diminat. Citra institusi (*insttusi branding*) dan keberlangsungan sosial Rumah Bersalin Panti Wanita mempunyai *value* tinggi pada perspektif masyarakat. Pengaruh ini berdampak pada peningkatan pada jumlah pasien untuk memperoleh pelayanan.



Gambar 1.4. Dokter Soejadmoko.

Sumber: Buku 30 Tahun GKJW Ponorogo, hlm. 29.

Dokter Soejadmoko asli dari Buluwalang Malang. Dalam ingatan kolektif para saksi. Dokter Soejadmoko tinggal mengontrak di Jalan Batorokatong.⁴⁸ Ia terkenal akan kecerdasannya. Supangat secara eksplisit memberikan kesaksian, menurutnya pola pikir yang dimiliki oleh Dokter Soejadmoko megarahkan fungsi perkembangan yang visioner. Dalam kehidupan karier personalnya, ia mengikuti banyak organisasi⁴⁹ dan memiliki relasi dengan pejabat-pejabat.⁵⁰ Dalam lingkungan Greja. Pada tahun 1973, Ia berposisi sebagai ketua dalam bidang Kesehatan GKW Pusat.⁵¹ Peranannya dalam organisasi juga akan memberikan puncak karir dimasa-masa mendatang.

Dalam gaya hidup personalnya. Dokter Soejadmoko terkenal *supel* dan dengan kepintarnya ia dihargai. Kesaksian Supangat memberikan contoh, bahwa ketika di luar jam kerja ia memiliki hobi bermain kartu *Brich*.⁵² Sedangkan dalam *role stylenya* selangkah melebihi zaman pada saat itu. Menurut kesaksian Mariyati, ia berkendara menggunakan motor vespa, kala itu menjadi barang yang mewah. Kesaksian tersebut menunjukkan, bahwa dokter ini memiliki kemampuan yang multidemnsional.⁵³

Pada era direktur Dokter Soejadmoko (1967-1974),

⁴³ Akta Mendirikan Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik Rumah Bersalin Panti Wanita Siman.

⁴⁴ Noerseto, Christian, hlm. 4.

⁴⁵ Wawancara Mariyati. Loc. Cit.

⁴⁶ *Curriculum Vitae* Dokter Soejadmoko.

⁴⁷ *Peraturan Pokok Ketenagaan YK-GKJW*. Op. Cit, hlm. 15.

⁴⁸ Wawancara Mariyati. Loc. Cit.

⁴⁹ Wawancara Supangat. Ponorogo, 21 Agustus 2025.

⁵⁰ Wawancara Mariyati. Loc. Cit.

⁵¹ *Majelis Agung GKJW*, Laporan Badan Diakonia dalam Sidang Sinode ke-61, Malang, 1973.

⁵² Wawancara Supangat. Loc. Cit.

⁵³ Wawancara Mariyati. Loc. Cit.

branding moril dan *value* sosial dalam masyarakat semakin meningkatkan kualitas institusi. Era ini mengawali puncak kejayaan Rumah Bersalin Panti Wanita. Hal tersebut dibuktikan, setelah satu tahun setengah masa direktur Dokter Soejadmoko, bahwa Rumah dan tanah Institusi sebelumnya mengontrak di rumah joglo milik Haji Dimiyati, Pada 30 Oktober 1968 berhasil dibeli dan secara resmi menjadi Yayasan Kesehatan GKJW Daerah.⁵⁴ Tinjauan lanjut, perkembangan institusi juga dibuktikan dengan pembukaan cabang pelayanan baru di Kecamatan Babadan berstatus sebagai Balai Pengobatan (BP) pada tahun 1968.⁵⁵ Pelayanan beroperasi setiap hari pada pukul 07.00-12.00.⁵⁶ Situasi aktivitas tenaga kerja di Rumah Bersalin Panti Wanita cukup terekam pada era ini. Mariyati memberikan kesaksian, sebelum melakukan aktivitas pekerjaan, pada jam 07.00 tenaga kerja akan berkumpul untuk melakukan doa. Pendeta akan datang setiap satu Minggu sekali guna memimpin doa dan memberikan petuah rohani.

Berdasarkan temuan yang ada, pada era kepemimpinan Bu Bingar keseluruhan pegawai berjumlah 14 orang. Bertambah pesat pada era kepemimpinan direktur Dokter Soejadmoko tahun 1967 berjumlah 20 orang dan pada tahun 1973-1974 berjumlah 27 orang. Selain itu, tenaga kesehatan institusi juga mengalami transisi pertambahan pelayanan baru yaitu satu dokter dan dua pegawai laboratorium.⁵⁷ Pada jam kerja masih dalam pembagian yang sama, shift pertama jam 07.00-14.00, kedua jam 14.00-21.00, ketiga jam 21.00-07.00. Adapun dokter umunya bekerja sampai jam dua siang, namun harus tetap bersedia memenuhi panggilan tugas malam apabila terdapat situasi darurat.

Jika ditotal secara keseluruhan Rumah Bersalin Panti Wanita pada tahun era Direktur Dokter Soejadmoko tahun 1966-1974 telah melayani 4.621 kelahiran. Pada era direktur Dokter Soejadmoko, jumlah pasien cenderung meningkat. Sebagaimana kesaksian dari Mariyati⁵⁸, pada tahun 1970-an Rumah Bersalin Panti Wanita berada pada puncak kejayaannya. Perkembangan pada jumlah pasien pada tabel 1.3 yang terus menambah menjadi bukti bahwa Rumah Bersalin Panti Wanita semakin dikenal oleh masyarakat Ponorogo.

Tabel 1.3. Jumlah Kelahiran Pasien RB. Panti Wanita Tahun 1967-1974.

Tahun	Kelahiran di RB. Panti Wanita
1967	480
1968	427

1969	499
1970	504
1971	647
1972	692
1973	642
1974	730

Sumber: Buku Laporan Pasien RB. Panti Wanita 1967-1974 dan Buku BPS Ponorogo tahun 1984.

Pada aspek prasarana, sejak dimulainya kepemimpinan direktur Soejadmoko pada Maret 1967—telah mengalami perkembangan yang signifikan dan relatif pesat. Secara periodik keadaan tersebut dibuktikan dengan pembelian tanah dan gedung Rumah Bersalin Panti Wanita di Jalan Sultan Agung No. 68, Kecamatan Ponorogo.⁵⁹ Sebagaimana yang telah dijelaskan, berdasarkan laporan Synode GKDW ke 52, selama aktivitas operasional 1956-1967 hak milik tanah dan gedung masih menyewa di juragan batik Haji Dimiyati. Pada 30 Oktober 1968 atas bantuan dana dari NHK, mampu membeli dengan harga Rp.720.000.⁶⁰ Berdasarkan Laporan Badan Kesehatan GKJW, pihak dari GKJW juga turut menyumbangkan sebanyak Rp.25.000.⁶¹ Kepemilikan tanah dan gedung tersebut secara sah menjadi Yayasan Kesehatan GKJW Pasamuhan Ponorogo.⁶² Keseluruhan luas tanah yang dibeli berukuran 28,45 M x 23,69 M.⁶³

Demi memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Ponorogo, pada pertengahan tahun 1960-an, Rumah Bersalin Panti Wanita membuka cabang ketiga di Kecamatan Babadan dengan status pelayanan Balai Pengobatan. Berdasarkan bukti tertulis, bahwa Balai Pengobatan Panti Wanita sudah memulai aktivitas operasional sejak tahun 1968.⁶⁴

Pada pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan, terutama guna menunjang analisis racikan obat. Pada tahun 1970-an dibangun ruangan laboratorium pada bagian Timur ruangan Rumah Bersalin Panti Wanita pusat. Catatan tertua tertulis pada tahun 1973, laboratorium telah beroperasi dengan tiga pekerja analisis obat.⁶⁵ Pada awal tahun 1970-an, pelayanan penitipan anak dialihkan semua ke cabang Siman.⁶⁶ Ruangan penitipan anak dialihkan menjadi ruang pasien umum.⁶⁷

Dalam perkembangan sarana, pada Rumah Bersalin Panti Wanita pusat, terhitung 1973 berdasarkan laporan keadaan dalam buku “Benih yang Tumbuh 7 GKJW”, terdapat 26 kapasitas ruangan, 18 ruang persalinan, delapan ruang anak-anak, dan satu ruang dokter. Pada akses transportasi, jumlah sepeda yang awalnya hanya dua, pada tahun 1967 bertambah menjadi tiga.⁶⁸ Pada tahun

⁵⁴ Laporan Badan Pekabaran Injil Synode GKDW ke-52 di Sidoarjo Tahun 1968 (1968), hlm. 1.

⁵⁵ Badan Pekabaran Indjil, Laporan Badan Pekabaran Indjil pada Sidang Synode GKJW di Swaru, 1973, hlm. 2.

⁵⁶ Bertahan hanya sekitar 10 tahun saja, mengingat, tahun 1980-an banyak pembangunan rumah sakit di Ponorogo.

⁵⁷ Daftar Tenaga Kerja Rumah Bersalin Panti Wanita Tahun 1973. Loc.Cit.

⁵⁸ Wawancara Nariyati. Loc. Cit.

⁵⁹ Arsip Pedoman Pelaksanaan Rumah Bersalin Panti Wanita _____.

⁶⁰ Laporan Badan Pekabaran Injil Synode GKDW ke-52 di Sidoarjo Tahun 1968. Loc. Cit.

⁶¹ Laporan Badan Kesehatan GKJW Daerah Tahun 1968.

⁶² Akta Tanah dan Bangunan Rumah Bersalin Panti Wanita. Loc. Cit.

⁶³ Buku Laporan Rumah Bersalin Panti Wanita Tahun 2002 (Ponorogo: RB Panti Wanita, 2002), hlm.1.

⁶⁴ Laporan Badan Pekabaran Indjil Synode GKDW ke 52 Tahun 1968 di Sidoarjo, hlm.2.

⁶⁵ Sir, H., hlm. 216.

⁶⁶ Wawancara Mariyati. Loc. Cit.

⁶⁷ Aktivitas inap pasien umum baru terlaksana pada tahun 1970-an akhir.

⁶⁸ Wawancara Mariyati. Loc. Cit.

1970-an, tempat pendaftaran yang awalnya hanya satu bertambah menjadi tiga, hal tersebut terjadi guna mengoptimalkan pelayanan dengan pasien Keluarga Berencana (KB).⁶⁹

Kemajuan juga terjadi di cabang Siman, menurut Harno, sebelum masa direktur Dokter Soejadmoko Rumah Bersalin Panti Wanita Siman tidak mempunyai akses listrik. Maka, pada akhir 1960-an, Dokter Soejadmoko melalui harta pribadinya menyumbangkan akses listrik ke cabang Siman.⁷⁰ Selanjutnya, pada tahun 1973 status cabang Siman yang awalnya Rumah Bersalin bertansformasi menjadi Balai Pengobatan. Berdasarkan buku "Benih yang Tumbuh 7 GKJW" kapasitas bangunan di cabang Siman sebanyak 15 ruang.

Pada November 1974 menjadi tonggak perkembangan lebih jauh. Rumah Bersalin Panti Wanita Jalan Sultan Agung, telah memulai membangun gedung secara permanen dan ruang tingkat hunian untuk paramedis yang rumahnya jauh.⁷¹ Dalam Laporan MD Sidang Synode 61 biaya pembangunan mencapai Rp.3.000.000.⁷² Fakta tersebut menunjukkan, bahwa tahun 1974 merupakan titik perubahan yang nyata dalam perbaikan prasarana menjadi lebih baik.

C. Aktivitas Pelayanan Sosiologi Kesehatan Masyarakat Ponorogo

1. Pelayanan Rawat Kunjungan Pasien

Sejak awal berdiri, Rumah Bersalin Panti Wanita memiliki pelayanan kunjungan ke rumah pasien. Pelayanan ini menjadi sangat ikonik pada zamannya, sebab pada era 1950-1970-an, pelayanan kunjungan rumah pasien hanya ada di Rumah Bersalin Panti Wanita saja. Faktor ini menjadi daya tarik bagi pasien masyarakat khususnya area Kecamatan Ponorogo (pusat kota).⁷³ Pasca melahirkan, pasien akan ditawarkan pelayanan ini, dengan tempo setiap satu Minggu sekali serta jangka sesuai kebutuhan pasien. Menurut Mariyati, rata-rata pasien meminta kunjungan selesai setelah satu bulan pasca melahirkan dan juga biasanya sampai tali pusar di bayi telah dipotong.⁷⁴

Umumnya pelayanan ditugaskan oleh satu bidan dan satu juru rawat yang dibagi berdasarkan penjadwalan kerja. Namun, apabila bidan masih sibuk dalam mengurus pasien, pelayanan dilakukan oleh dua juru rawat. Tenaga kesehatan berangkat menggunakan sepeda tumpangan becak yang sudah disediakan oleh rumah bersalin. Tidak jarang, keluarga pasien akan menuju ke rumah bersalin untuk menjemput perawat menggunakan dokar dan becak. Setiap melakukan pelayanan, akan berangkat pagi dan kembali lagi ke rumah bersalin pada siang hari, rata-rata sekali berangkat akan melayani dua hingga tiga kunjungan pasien.⁷⁵

Banyak keluarga tokoh-tokoh masyarakat Ponorogo yang menjadi pelanggan. Termasuk memberikan kedekatan kepada pengusaha-pengusaha etnis Tionghoa yang rata-rata menjadi pasien tetap meminta pelayanan kunjungan ke rumah paling lama. Misalnya keluarga etnis Tionghoa di Toko Rame, Toko Murah, dan area pecinan di jalan Jenderal Sudirman.⁷⁶

"Intinya orang-orang punya uang yang menjadi pasien kunjungan ke rumah. Dulu banyak etnis Tionghoa yang melahirkan di Panti Wanita. Rata-rata mereka meminta pelayanan kunjungan ke rumah paling lama, bisa satu bulan atau wajib sampai tali pusar bayi terpotong."⁷⁷

Tidak hanya itu, sebagaimana penuturan Sri Prihatin, saat ia menjadi juru rawat bantu sering melayani kunjungan pasien terhadap juragan-juragan batik yang berada di area jalan Batorokatong.⁷⁸ Pada tahun 1961, Sri Prihatin melayani salah satu keluarga juragan batik terkemuka bernama Bu Haji Mawardi, seorang ibu yang memiliki anak bernama Tobron. Tokoh warok legendaris di Ponorogo. Keluarga juragan batik sudah menjadi pelanggan, sehingga ia sering melakukan komunikasi yang secara otomatis memiliki kedekatan emosional. Tidak jarang, Warok Tobron yang sangat ditokohkan masyarakat Ponorogo sering memanggil "mbak yu" kepada Sri Prihatin.⁷⁹

Selain itu, pasien terkadang memberikan semacam permintaan agar pelayanan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ia suka. Kondisi ini terjadi pada Mariyati pada tahun 1970-an. Terdapat pasien yang sudah menjadi pelanggan, walaupun rumahnya di Kabupaten Magetan mereka tetap ingin melahirkan di Rumah Bersalin panti Wanita. Mariyati selaku juru rawat memiliki kedekatan emosional dengan keluarga tersebut, ia selalu ditunjuk saat melakukan pelayanan kunjungan di rumahnya.⁸⁰ Hingga pada tahun 1974, aktivitas kunjungan di rumah pasien masih dilakukan. Mengingat, pada tahun setelahnya, terutama tahun 1980-an, aktivitas ini semakin sering dilakukan.⁸¹

2. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

Pelaksanaan program penekanan angka kelahiran bertujuan untuk menstabilkan jumlah penduduk yang mengalami kelonjakan. Berdasarkan arsip laporan, Rumah Bersalin Panti Wanita menjadi pihak awal yang melakukan pengendalian angka kelahiran di Ponorogo—telah diresmikan pada 1 Agustus 1968 dengan no kode 13.11.14.82. Merujuk pada tahun tersebut, pemerintah secara nasional baru menyelenggarakan program pengendalian kelahiran yang disebut sebagai Program Keluarga Berencana (KB) pada 17 Oktober 1968 melalui Surat Keputusan No. 36/KPTS/Kesra/X/1968.83 Sedangkan, pada laporan Rumah Bersalin Panti Wanita,

⁶⁹ Wawancara Harno. Loc. Cit.

⁷⁰ Ibid.,

⁷¹ Wawancara Christian Noerseto. Loc. Cit.

⁷² Laporan Badan Diakonia MA GKJW dalam Sidang Synode ke-61. Loc. Cit.

⁷³ Wawancara Endang. Loc. Cit.

⁷⁴ Wawancara Mariyati. Loc. Cit.

⁷⁵ Ibid.,

⁷⁶ Wawancara Endang. Loc. Cit.

⁷⁷ Wawancara Mariyati. Loc. Cit.

⁷⁸ Sri Prihatin merupakan juru rawat Bidan Soedarman yang sering ditugaskan membantu di RB. Panti Wanita.

⁷⁹ Ibid.,

⁸⁰ Wawancara Tim Peneulis Sejarah GKJW Ponorogo dengan Mariyati, 2020.

⁸¹ Ibid.,

⁸² Laporan Keluarga Berencana di Rumah Bersalin Panti Wanita 1969-1974.

⁸³ Sejarah pembentukan Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN), yang kemudian menjadi Badan Koordinasi Keluarga

Program KB di Kabupaten Ponorogo baru ada pada awal tahun 1969.⁸⁴

Peran Rumah Bersalin Panti Wanita selain sebagai pelopor KB di Kabupaten Ponorogo diantaranya, pertama, sebagai pusat Program KB di Kabupaten Ponorogo. Kedua, sebagai pelayan dan konsultasi keberlanjutan terhadap pasien KB di Kecamatan Ponorogo (Dokter Soejadmoko, Bidan Bingar, Bidan Kurniyawati, dan Bidan Praptiningsih) dan Kecamatan Siman yang ditangani oleh Bidan Piryuana. Ketiga, sebagai tenaga lapangan yang memberikan sosialisasi terkait KB kepada masyarakat.⁸⁵

Pada tahun 1969 Rumah Bersalin Panti Wanita melayani 169 pasien dengan metode PILL sebanyak 12 pasien, IUD sebanyak 143 pasien, dan kondom sebanyak 9 pasien. Pada tahun ini, pengupayaan agar masyarakat memakai KB terlalu terburu-buru yang hanya melakukan pelayanan di Institusi saja tanpa adanya sosialisasi yang dilakukan. Maka cakupan pasien jauh dari pemenuhan target.⁸⁶

Dalam rangka mencapai keberhasilan KB yang optimal dan berkelanjutan, pada 29 Juni 1970 pemerintah secara total terlibat dalam Program KB, berdasar Keputusan Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat Nomor 35/Kpts/Kesra/X/1970. Maka terbentuklah BKKBN sebagai koordinator, diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, dan ditanggung jawabi oleh Bupati Kabupaten Ponorogo.⁸⁷ Adanya Keputusan juga menjadikan Institusi Panti Wanita cabang Siman turut membuka pelayanan KB dengan fokus penanganannya terbatas pada di Kecamatan Siman.

3. Pelatihan Dukun Bayi

Keikutsertaan Rumah Bersalin Panti Wanita dalam program pelatihan pada dukun bayi telah dilakukan sejak era direktur Dokter Soejadmoko awal 1970-an. Rumah Bersalin Panti Wanita menjadi institusi kesehatan yang diamanatkan oleh Dinas Kesehatan Ponorogo untuk melatih dukun-dukun bayi di Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Program ini wajib dilaksanakan, mengingat peraturan yayasan mengharuskan institusi untuk turut menyelenggarakan kursus-kursus, pelatihan, dan menyebarluaskan informasi dalam bidang kesehatan.⁸⁸ Sebagaimana pernyataan Mariyati, ruang dan aktivitas di cabang Siman tidak ramai sebagaimana di pusat kota, sehingga Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Rumah Bersalin Panti Wanita. Sedangkan prasarana medis disediakan oleh Rumah Sakit Umum Ponorogo.⁸⁹

Meninjau kondisi kesehatan Kabupaten Ponorogo tahun 1970-an tergolong belum terlayani secara penuh, rumah sakit-rumah sakit lain baru dibangun tahun 1980-an. Dari realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat dilihat bahwa suatu persoalan kesehatan sering kali tidak

dapat diselesaikan oleh tenaga medis. Keberlangsungan tersebut membentuk sebuah keyakinan terhadap entitas yang dianggap ahli dan dapat memberikan pertolongan, dalam konteks ini adalah dukun bayi.⁹⁰

Demikian juga di Kabupaten Ponorogo, saat penulis melakukan pencarian sumber *oral history*, selaksa pelaku dan saksi menyatakan. Banyak proses persalinan ditangani oleh dukun bayi di era 1950-1970-an yang menunjukkan bahwa peran dukun bayi masih menjadi utama dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana dalam penelitian Aprilia Kustanti menunjukkan, bahwa sebelum tahun 1970-an hampir 80% kelahiran ditangani oleh dukun bayi.⁹¹

Jika lingkup Kecamatan Siman, Rumah Bersalin Panti Wanita yang berperan aktif mewadahi dalam pelatihan terhadap dukun bayi dengan Bidan Praptiningsih sebagai ketua koordinator. Dukun-dukun yang berada area Kecamatan Siman dikumpulkan oleh pemerintahan kecamatan untuk dibina di Rumah Bersalin Panti Wanita Cabang Siman. Jadwal pelatihan dilakukan dengan istilah “sapien dino pisan” atau setiap satu bulan sekali, umumnya pada hari pasaran Rabu Pon.

Pembagian tenaga kesehatan di Rumah Bersalin Panti Wanita disesuaikan dengan kondisi aktivitas rumah bersalin, mengingat kala itu Panti Wanita juga menjadi bagian dalam melayani Program KB. Maka bidan dan juru rawat yang melatih dukun di Cabang Siman dengan sistem penjadwalan shift.⁹² Menurut Harno, sebelum berangkat menuju cabang Siman, meski tidak aktif terlibat, Dokter Soejadmoko akan memberi arahan kepada bidan dan juru rawat. Sedangkan peralatan-peralatan persalinan sudah disediakan oleh Dinas Kesehatan Ponorogo. Dokter Soejadmoko baru turut menangani saat bidan tidak dapat hadir dalam pelatihan.⁹³

Lebih jauh, Harno menjelaskan, dukun bayi itu akan diberikan pengetahuan terkait cara melahirkan, memandikan, dan menggendong bayi yang benar. Dukun juga diberikan seperangkat alat medis berupa gunting, dot, perban, dan obat merah. Pelatihan yang diajarkan juga menjunjung kehegemonisan sehingga diajarkan agar dukun bayi selalu merebus peralatan dengan air hangat sebelum melaksanakan pelayanan persalinan.⁹⁴

Tata cara persalinan yang dilakukan dukun bayi jauh dari disiplin medis, misalnya cara memotong pusar bayi, dukun hanya menggunakan alat bernama “welat” (bambu yang ditajamkan), teknologi tradisional ini sudah tidak relevan dengan perkembangan medis tahun 1970-an, maka dukun akan diberikan gunting medis yang higienis.⁹⁵ Mariyati juga menambahkan, ketika bayi dari pasien tidak mau minum asi, dukun bayi akan menganjurkan pemberian susu dengan alat bantu berupa pucuk jarik yang diperas. Dalam pelatihan, tata tradisional tersebut digantikan

Berencana Nasional (BKKBN), diinstruksikan melalui Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1968 kepada Menteri Kesejahteraan Rakyat, dan lembaga ini awalnya berstatus sebagai lembaga semi-pemerintah sebelum kemudian berkembang menjadi lembaga pemerintah non-departemen

⁸⁴ Aprilia Kustanti. Op. Cit, hlm. 23.

⁸⁵ Ibid.,

⁸⁶ *Laporan Keluarga Berencana di Rumah Bersalin Panti Wanita 1969-1974*. Loc. Cit.

⁸⁷ Aprilia Kustanti. Op. Cit, hlm. 51.

⁸⁸ *Peraturan Pokok Ketenagaan TK-GKJW*, Bab Ketentuan Umum, Pasal 1 (Madiun: GKJW, tahun), hlm. 32.

⁸⁹ Wawancara Mariyati. Loc. Cit.

⁹⁰ M. Dimiyati, H. *Peran Dukun terhadap Perkembangan Peradaban Budaya Masyarakat Jawa*. (2015). _____.

⁹¹ Aprilia Kustanti. Op. Cit, hlm. 60.

⁹² Wawancara Mariyati. Loc. Cit.

⁹³ Wawancara Harno. Loc. Cit

⁹⁴ Ibid.,

⁹⁵ Wawancara Sukadi. Loc. Cit.

dengan pemberian dot. Pada saat menanganai pasien, dukun bayi juga selalu memaksakan pasien agar melahirkan dengan cara jongkok, cara yang salah tersebut dapat membahayakan kepala bayi saat keluar dari perut ibu. Dengan adanya pelatihan, dukun bayi dilatih oleh paramedis Rumah Bersalin Panti Wanita agar ketika ibu melahirkan dilakukan dengan cara tidur.⁹⁶

Keberlanjutan pelatihan dukun di Rumah Bersalin Panti Wanita cabang Siman tidak ditemukan oleh penulis. Berdasarkan penelitian lapangan, dukun-dukun bayi era 1970-an saat ini sudah banyak yang meninggal. Selain itu terdapat beberapa dukun telah lanjut usia yang fisiknya sudah rentan dan ingatannya sudah tidak kuat “pikun”.

Sedangkan, resepon para dukun bayi kala itu menerima pelatihan dengan baik. Menurut Mariyati dan Harno selaku juru rawat yang pernah membantu pelatihan pada dukun bayi. Menurutnya dukun hanya diberikan pelatihan setiap satu bulan sekali dan tidak ada ujian untuk memantau pelayanan dukun bayi saat praktek di lapangan. Aktivitas Rumah Bersalin Panti Wanita dalam melatih dukun bayi berakhir sejak tahun akhir 1970 hingga awal 1980-an. Pernyataan tersebut berdasar dari pelaku sejarah Mariyati juru rawat dan Katirin sebagai saksi tinggal lama di Institusi Panti Wanita cabang Siman sejak tahun 1969.⁹⁷ Mereka mengatakan hal yang sama, menunjukkan aktivitas pelatihan dukun bayi pada tahun 1974 masih berlangsung. Sedangkan faktor berakhirnya pelatihan bayi, dimungkinkan karena pemerintah menjalankan pelatihan secara mandiri. Oleh karena itu, Rumah Bersalin Panti Wanita tidak lagi dilibatkan.⁹⁸

D. Rumah Bersalin Panti Wanita Terintegrasi ke dalam Yayasan Kesehatan GKJW (YK-GKJW)

Rumah Bersalin Panti Wanita merupakan institusi yang didirikan secara partikelir oleh perjuangan paramedis beragama Kristen di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan data kronik, pada tahun 1952 dari 12 keluarga dalam persekutuan Kristen, sebanyak delapan keluarga berprofesi sebagai bidan dan mantri. Mereka memulai membangun institusi rumah bersalin pada tahun 1954 dan berhasil didirikan pada 1 Juni 1956 menggunakan tenaga materil dan pengetahuan mereka sendiri tanpa bantuan sedikitpun dari lembaga pusat Gereja.⁹⁹

Kenyataan serupa juga terjadi di berbagai institusi kesehatan yang didirikan perjuangan umat GKJW di daerah-daerah lain. Kondisi tersebut menjadikan status hukum institusi kesehatan Kristen yang masih berbeda-beda.¹⁰⁰ Hal ini menunjukkan belum terbentuknya koordinasi organisatoris antar lembaga, sehingga institusi kesehatan sering mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahannya secara mandiri.¹⁰¹ Jika terus dibiarkan, bisa mengandung kerawanan dalam

kondisi politik Indonesia yang berkarakter otoritarian kuat. Maka melalui Majelis Agung (MA) menghendaki supaya semua institusi kesehatan di lingkungan GKJW organisatoris bergabung menjadi satu Yayasan Kesehatan GKJW (YK-GKJW) dengan akte notaris Dalid Muslim Malang No.78 tgl. 29 Juni 1974.¹⁰²

Perencanaan dimulai pada 21 Januari 1974,¹⁰³ sedangkan visitasi dilakukan di Rumah Bersalin Panti Wanita Ponorogo pada 20 Februari 1974. Berdasarkan laporan tersebut, kerangka administrasi Rumah Bersalin Panti Wanita dilakukan pada 15 Maret 1974.¹⁰⁴ Pada tanggal 30 Juli 1974 pengurus Yayasan Kesehatan GKJW Ponorogo telah disahkan, dengan ketua I yaitu Bapak Soedoyo. Pada 23 Agustus 1974 Secara resmi Rumah Bersalin Panti Wanita dilantik untuk memulai tugasnya.

Tabel 1.4 Struktur Pengurus Yayasan Kesehatan GKJW Ponorogo 1974.

Nama	Jabatan
Sdr. Soeroyo	Ketua I
Sdr. Idenisetyo	Ketua II
Sdr. R.S. Budi Harjantho	Sekretaris
Sdr. Panut Iksan Martono	Bendahara
Sdr. Ny. Soedarman	Anggota Pembantu

Sumber: Laporan Badan Diakona MA GKJW Sidang Synode ke 61 di Malang Tahun 1974.

Tugas yayasan ini memebrikan saran naungan dan kontrol institusi kesehatan milik GKJW di Ponorogo, yaitu Institusi Rumah Bersalin Panti Wanita di Jalan Sultan Agung (pusat) dan Kecamatan Siman. Pelayanan Klinik Keluarga Berencana Unit DGI di jalan Sultan Agung, Kecamatan Siman, serta Balai Pengobatan yang berada di Kecamatan Babadan.¹⁰⁵

Pada proses integrasi menjadi yayasan, pengurus Rumah Bersalin Panti Wanita menerima tanpa adanya penolakan. Mengingat para *founding fathers* Rumah Bersalin Panti Wanita berasal dari kalangan umat Kristen, maka keputusan Majelis Agung untuk membentuk sebuah yayasan disambut secara positif oleh para pendiri. Proses intergrasi berjalan dengan optimal tanpa kendala sedikitpun. Perubahan ini sekaligus menandai terbangunnya harmonisasi menyatu saling berkaitan.¹⁰⁶ Kekayaan Rumah Bersalin Panti Wanita secara sah menjadi milik Majelis Agung GKJW. Namun demikian Majelis Agung tetap menunjukkan apresiasi terhadap inisiatif dan perjuangan umat Kristen yang secara partikelir membangun Rumah Bersalin Panti Wanita.

Setelah Rumah Bersalin Panti Wanita diakuisisi sebagai bagian dari Yayasan Kesehatan GKJW (YK-GKJW), terlihat adanya perkembangan dalam bentuk

⁹⁶ Wawancara Mariyati. Loc. Cit.

⁹⁷ Ibunya Katirin bernama Mbok Som, petugas dapur di Siman sejak tahun 1969-2008.

⁹⁸ Katirin yang dikonfirmasi Mariyati.

⁹⁹ Noerseto, C., (1989). Op. Cit, hlm. 2-3.

¹⁰⁰ Panitia Peringatan 100 Tahun RSK Mojowarno. (1994). Op. Cit, hlm 74-75.

¹⁰¹ Badan Diakona MA, “Laporan Badan Diakona MA GKJW dalam

Sidang Synode ke-6. Op. Cit.

¹⁰² Ibid.,

¹⁰³ Ibid.,

¹⁰⁴ Ibid.,

¹⁰⁵ Ibid., hlm.1.

¹⁰⁶ Anggaran Dasar YK-GKJW Bab II Pasal II tentang Dasar dan Tujuan no.2

penambahan layanan, dukungan, serta penguatan kelembagaan. Dalam aspek pelayanan terhadap pasien, yayasan menekankan bahwa layanan kesehatan tidak berorientasi pada keuntungan (*non-profit centric*), sehingga institusi tidak diperkenankan menerima pasien dengan alasan ekonomi. Kebijakan ini mencerminkan nilai-nilai pelayanan kesehatan yang telah dibangun sebelumnya.¹⁰⁷

Lebih lanjut, mengacu pada pendapat sejarawan dan pengurus Majelis Agung GKJW, Sulistiani, YK-GKJW mempertahankan prinsip pelayanan kesehatan yang berlandaskan nilai-nilai kekristenan, yang tercermin dalam kisah Orang Samaria yang baik hati dalam Alkitab (Lukas 10:25–37). Dalam konteks ini, Rumah Sakit Mojowarno dipandang sebagai pioner yang menjadi panutan dalam penerapan nilai-nilai di Rumah Bersalin Panti Wanita.¹⁰⁸

Dalam kerangka sosiologi kesehatan, penerapan kebijakan ini di Rumah Bersalin Panti Wanita tampak pada praktik memberikan layanan gratis bagi pasien yang kurang mampu. Hal ini dibuktikan melalui data administrasi pasien, khususnya pada laporan penghasilan dan keterangan “tidak membayar”. Pada tahun 1974 tercatat sebanyak 12 pasien yang tidak dikenakan biaya pelayanan, yang menunjukkan komitmen institusi dalam menjalankan fungsi sosialnya.¹⁰⁹

Selain itu, melalui kebijakan Yayasan Kesehatan GKJW (YK-GKJW),¹¹⁰ Rumah Bersalin Panti Wanita mengalami pengembangan dalam bentuk penambahan layanan berupa “pengobatan holistik”. Dalam implementasinya, proses penyembuhan tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga mencakup dimensi spiritual pasien. Sejak tahun 1974, pendekatan holistik ini mulai diterapkan dengan memberikan perhatian pada kesehatan rohani sebagai bagian integral dari proses pemulihan.

Selain itu, peran YK-GKJW juga turut membina pembangunan gedung tingkat dan bangunan asrama permanen Rumah Bersalin secara permanen. Hal ini tertuang dalam peraturan YK-GKJW Bab IV Pasal 2, bahwa pengurus yayasan daerah merupakan pengurus dan pemelihara utama atas gedung-gedung instansi.¹¹¹ Pengurus yayasan juga memberikan laporan kepada pihak Majelis Agung melalui sidang Synode ke 61 dengan biaya Rp.3.000.000.¹¹² Selanjutnya, implementasi dari Peraturan Usaha YK-GKJW Pasal 3 yang berkaitan dengan penyelenggaraan kursus dan pendidikan kesehatan mulai direalisasikan secara konkret.¹¹³ Berdasarkan kesaksian Maryati, pada tahun 1974 jumlah pasien di Rumah Bersalin Panti Wanita mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga menimbulkan kebutuhan mendesak akan penambahan tenaga kesehatan.¹¹⁴

Merespons kondisi tersebut, Majelis YK-GKJW Ponorogo mengambil langkah strategis dengan mengumumkan kepada jemaat gereja untuk membuka kesempatan bagi para pemuda, khususnya dari kalangan

umat Kristen Ponorogo, untuk menempuh pendidikan di bidang kesehatan. Kebijakan ini bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis, tetapi juga sebagai upaya kaderisasi sumber daya manusia yang nantinya akan mengabdikan di Rumah Bersalin Panti Wanita.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Integrasi Rumah Bersalin Panti Wanita ke dalam Yayasan Kesehatan GKJW (YK-GKJW) memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan institusi. Proses ini integrasi membawa perubahan yang bersifat sistematis dan berkelanjutan, baik dalam aspek kelembagaan maupun operasional. Yayasan berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam menjembatani berbagai kebutuhan institusi, termasuk dalam hal pengembangan layanan, menyalurkan sumber daya, serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Keberadaan YK-GKJW tidak hanya memperkuat kelembagaan Rumah Bersalin Panti Wanita, tetapi posisi juga mendorong terciptanya perkembangan institusi yang lebih optimal melalui sistem dukungan yang diselenggarakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pendirian Rumah Bersalin Panti Wanita di Kabupaten Ponorogo tidak dapat terpisahkan dampak sosial-politik nasional terhadap kondisi pelayanan bersalin. Pada sebelum hingga awal tahun 1950-an, pelayanan kesehatan di Kabupaten Ponorogo masih sangat terbatas. Mengingat dekade tersebut pertumbuhan penduduk mengalami penambahan yang tidak terkontrol (*baby boom*). Mengetahui itu, fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak merata, sehingga dalam bersalin masyarakat hanya mengandalkan peran dukun bayi yang sama sekali tidak memperhatikan teknik medis.

Bersamaan dengan kondisi tersebut, pada akhir tahun 1940-an banyak paramedis dari pemerintah yang dikirim ke Rumah Sakit Umum Ponorogo. Secara kotingensial paramedis tersebut merupakan umat Kristen dan membentuk menjadi persekutuan untuk memenuhi kewajiban peribadatan. Semakin menguatnya persekutuan Kristen, mendorong lahirnya inisiatif mendirikan institusi pelayanan bersalin di Ponorogo. Pendirian dimulai pada tahun 1952 dengan persiapan yang matang hingga pada 1 Juni 1956 Rumah Bersalin Panti Wanita melakukan pertama kali aktivitas pelayanan. Rumah Bersalin Panti Wanita merupakan institusi bersalin yang beraktivitas secara partikelir dengan tujuan kemanusiaan dengan direktur pertama bernama Bidan Bingar. Tenaga kesehatan bekerja tidak dengan upah dan pasien yang kurang mampu akan mendapatkan pembebasan biaya. Meski demikian, Rumah Bersalin Panti Wanita secara konsisten memberikan pelayanan baik dan visioner kepada masyarakat tanpa memandang dinding kepercayaan dan starta. Pendekatan inilah yang kemudian menumbuhkan kepercayaan masyarakat Ponorogo. Lebih lanjut, pada

¹⁰⁷ Ibid.,

¹⁰⁸ Wawancara Sulistiani, 2026. Loc. Cit.

¹⁰⁹ Laporan Pasien 1974 RB, Panti Wanita. Loc. Cit.

¹¹⁰ Anggaran Dasar YK-GKJW. Bab IV Pasal 7 No. 1.

¹¹¹ Ibid.,

¹¹² Laporan Badan Diakonia MA GKJW dalam Sidang Synode ke-61. Loc. Cit.

¹¹³ Anggaran Dasar YK-GKJW Bab II Pasal II tentang berkaitan dengan penyelenggaraan kursus dan pendidik Pasal 3 Nomor 3.

¹¹⁴ Wawancara Maryati. Loc. Cit. Memori kesaksian didapatkan ketika Maryati berlibur ke Bali, kar

tahun 1967 institusi mendatangkan dokter bernama Soejadmoko yang kemudian membuka pelayanan penyakit ringan, sehingga turut meningkatkan jumlah pasien.

Keberadaan Rumah Bersalin Panti Wanita sebagai institusi pelayanan bersalin di Kabupaten Ponorogo mencapai fase kulminasi pada tahun 1974. Melalui sidang Synode ke-61, institusi secara resmi berada dibawah Yayasan Kesehatan GKJW. Proses ini integrasi membawa perubahan yang bersifat sistematis dan berkelanjutan, yayasan berperan sebagai fasilitator dan mediator yang berdampak baik dalam aspek kelembagaan maupun operasional. Peristiwa tersebut menandai titik awal perkembangan yang lebih besar pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, Rumah Bersalin Panti Wanita tidak hanya menjadi bagian sejarah Kristen, melainkan juga bagian dari sejarah perkembangan kesehatan dan sosial di Kabupaten Ponorogo.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip

- Akta Mendirikan Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik Rumah Bersalin Panti Wanita Siman 1962.
Akta Tanah Dan Bangunan Rumah Bersalin Panti Wanita Tahun 1968.
Badan Pekabaran Injil GKJW. (1973). Laporan Badan Pekabaran Injil Pada Sidang Majelis Agung GKJW Ke-61. Majelis Agung GKJW.
Daftar Tenaga Kerja Rumah Bersalin Panti Wanita Tahun 1973.
Laporan Badan Diakonia MA GKJW Dalam Sidang Synode Ke-61. (1974). GKJW.
Laporan Badan Pekabaran Injil Synode GKDW Ke-52 Di Sidoarjo Tahun 1968. (1968).
Laporan Keluarga Berencana (KB) di Rumah Bersalin Panti Wanita 1969–1974.
Laporan Pasien 1962 Rumah Bersalin Panti Wanita.
Laporan Pasien 1963 Rumah Bersalin Panti Wanita.
Laporan Pasien 1964 Rumah Bersalin Panti Wanita.
Laporan Pasien 1965 Rumah Bersalin Panti Wanita.
Laporan Pasien 1966 Rumah Bersalin Panti Wanita.
Laporan Pasien 1967 Rumah Bersalin Panti Wanita.
Laporan Pasien 1968 Rumah Bersalin Panti Wanita.
Laporan Pasien 1969 Rumah Bersalin Panti Wanita.
Laporan Pasien 1970 Rumah Bersalin Panti Wanita.
Laporan Pasien 1971 Rumah Bersalin Panti Wanita.
Laporan Pasien 1972 Rumah Bersalin Panti Wanita.
Laporan Pasien 1973 Rumah Bersalin Panti Wanita.
Laporan Pasien 1974 Rumah Bersalin Panti Wanita.
Nota Pasien Rumah Bersalin Panti Wanita Tahun 1968.
Nota Pasien Rumah Bersalin Panti Wanita Tahun 1970.
Nota Pasien Rumah Bersalin Panti Wanita Tahun 1973.
Peraturan Pokok Ketenagaan Yayasan Kesehatan GKJW 1973.
Sirat Idzin Pemerintah Militer Kabupaten Ponorogo Tentang Idzin Pada Kaum Agama Kristen (1948).
Surat Putusan Gubernur Pendirian Rumah Bersalin Panti Wanita (20 April 1957).
Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan Mengenai Peningkatan Status Rumah Bersalin Panti Wanita Menjadi Rumah Sakit Gawat Darurat Dan Khusus Bedah (1996).

Surat Ukur Tanah Luas Bangunan Rumah Bersalin Panti Wanita Tahun 1960.

Tim Badan Statistik Kabupaten Ponorogo. (1984). Data jumlah pertumbuhan penduduk Kabupaten Ponorogo tahun 1961-1984. BPS Ponorogo.

Laporan Badan Kesehatan GKJW Daerah Tahun 1968.

B. Arsip Tidak Sezaman

Arsip Pedoman Pelaksanaan Rumah Bersalin Panti Wanita.

Surat Izin Pembangunan Gedung Greja Ponorogo Tahun 1988.

C. Surat Kabar

De Indische Courant. (1930). Boven Ponorogo.

De Locomotief. (1950). Opbouw Madiun (98e Jaargang No. 175).

De Nieuwsgier. (1948/1951). Desember 1948.

De Vrije Pers. (1949, Februari 18). 5000 kleine verhalen van een groot leed.

Eilanden Nieuws. (1994, Maret 25). Artikel oleh Cees van de Ree.

Java Bode. (1952). Rijsttekort in O-Java (16e Jaargang No. 38).

Java Bode. (1953). Indonesisch rampenfonds.

Leeuwarder Courant. (1948, Oktober 6). Hoofdblad van Friesland.

Merdeka. (1951). Dari Siti ke Gunung Kelud.

Nieuwe Courant. (1949). Orientatie te Madioen.

Nieuwe Courant. (1950). Malaria.

Pewarta Soerabia. (1957). Tambahan penduduk Ponorogo 20 ribu.

Trompet Masjarakat. (1956). 117 petani yang mengarap tanah kehutanan dihukum pertjobaan 6 bulan.

Trompet Masjarakat. (1956). Bandjir besar Ponorogo.

Trompet Masjarakat. (1956). Panen ikan Ponorogo.

Trompet Masjarakat. (1956). Ponorogo: Harga beras membumbung.

Trompet Masjarakat. (1956). Ponorogo: Penduduk Gunung Puntjak minta perhatian.

D. Buku

Aini, S., & Amini, M. (2023). Pemikiran Suliarti Saroso tentang kesehatan reproduksi ibu di Indonesia tahun 1950–1961. *Mozaik Humaniora*, 23(1), 77–92.

Akkeren, V. (1970). Sri and Christ. London.

Astiannis, R., & Saripudin. (2018). D. Johannes Leimena dalam kesehatan ibu dan anak di Indonesia (1946–1956). *Factum*, 7(2), 203–215.

BPH Majelis Agung GKJW. (1981). Peringatan 50 Tahun Majelis Agung GKJW. BPH Majelis Agung GKJW.

Buku Laporan Rumah Bersalin Panti Wanita Tahun 1999.

Buku Laporan Rumah Bersalin Panti Wanita Tahun 2022 (2002). RUMAH BERSALIN Panti Wanita.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (1980). Sejarah kesehatan nasional Indonesia (Jilid II). Departemen Kesehatan RI.

Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2009). Akuntansi manajerial (Edisi ke-8). Salemba Empat.

Huda, M. J. N. (2009). Imajinasi identitas sosial komunitas Reog Ponorogo. *Tips*.

- Hull, T. H., dkk. (1981). Sejarah keluarga berencana Indonesia: Keberhasilan dan tantangan. Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- Purwowijoyo. (1984). Babad Ponorogo (Jilid IV).
- Kuntowijoyo. (1990). Pengantar ilmu sejarah.
- Madjid, D. M., & Wahyudi, J. (2014). Ilmu sejarah: Sebuah pengantar.
- Majelis Agung GKJW. (1981). Peringatan 50 Tahun MA GKJW. BPH Majelis Agung GKJW.
- Muhammad, N. K. (2025). Greja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Jemaat Ponorogo tahun 1959 (Skripsi S1, Universitas Negeri Jember).
- Neelakantan, V. (2017). Science, public health and nation-building in Soekarno-era Indonesia.
- Noerseto, C. (1989). Hari ulang tahun ke-30 Psamuwan GKJW Ponorogo.
- Nugroho, A. S. (2009). Srihana-Srihani: Biografi Hartini Sukarno. Ombak.
- Panitia Peringatan 100 Tahun RSK Mojowarno. (1994). Sejarah Rumah Sakit Kristen Mojowarno.
- Purwowijoyo. (1985). Babad Ponorogo Jilid IV: R. Mertorahardjo. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ponorogo.
- Rajagukguk, W., & Samosir, B. O. (2015). Dinamika demografis Indonesia 1950–2100.
- Ravenstein, E. G. (1885). The laws of migration. *Journal of the Royal Statistical Society*, 48(2), 167–227.
- Rumah Sakit Umum Darmayu. (2018). Profil Rumah Sakit Umum Darmayu. Rumah Sakit Umum Darmayu.
- E. Skripsi/ Desertasi/ Tesis**
- Mualifah, N. (2025). Makna keyakinan “banyak anak banyak rezeki” pada masyarakat Ponorogo (Tesis Magister, IAIN Ponorogo).
- Azisah, N. (2017). Pengaruh love of money dan kecerdasan spiritual terhadap kecenderungan fraud accounting pada penggunaan dana desa dengan gender sebagai variabel moderating (Skripsi). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Kustanti, A. (2025). Dinamika pelaksanaan program keluarga berencana (KB) di Kabupaten Ponorogo 1978–1988 (Skripsi). Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nizam, K. (2025). Greja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Jemaat Ponorogo tahun 1959–2023 (Skripsi, Universitas Negeri Jember).
- Jurnal
- Zarate, M. A. (2010). The role of cultural inertia in reactions to immigration on the U.S./Mexico border. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2009.01632.x>
- Fomon, S. J. (2001). Infant feeding in the 20th century: Formula and beikost. *The Journal of Nutrition*, 131(2), 409S–420S. <https://doi.org/10.1093/jn/131.2.409S>
- Lawler, E. E. (1984). Leadership in participative organization. Dalam *Leaders and managers: International perspectives on managerial behavior and leadership*. Pergamon Press.
- Pratita, W., & Sjarif, D. R. (2018). Manfaat penambahan laktoferin pada susu formula lanjutan: Tinjauan sistematik. *Cermin Dunia Kedokteran*, 45(8), 611–614.
- Hartman, S. (2008). Venus in two acts. *Small Axe*, 12(2), 1–14.
- F. Sumber Lisan Pelaku & Saksi Sejarah**
- Endang Sulastri. (2025, 14 Agustus). Wawancara pribadi. Ponorogo.
- Harno. (2025, 20 Agustus). Wawancara pribadi. Ponorogo.
- Ibu Suratman. (2025, September 07). Wawancara pribadi. Ponorogo.
- Ipuk. (2026, Februari 21). Wawancara pribadi.
- Jimun. (2025, Desember 27). Wawancara pribadi. Ponorogo.
- Katirin. (2025, November 25). Wawancara pribadi. Tulungagung.
- Khoiri (2025 Desember 29). Wawancara pribadi. Ponorogo.
- Mariyati. (2026, Februari 26). Wawancara pribadi. Ponorogo.
- Moen. (2025, Desember 21). Wawancara pribadi. Ponorogo.
- Noerseto, C. (2025, September 06). Wawancara pribadi. Ponorogo.
- Panggabean, S. (2025, Agustus 20). Wawancara pribadi. Ponorogo.
- Sri Prihatin. (2025, Agustus 10). Wawancara pribadi. Ponorogo.
- Sukadi. (2025, Oktober 21). Wawancara pribadi. Ponorogo.
- Sulistiani (2026 April 03). Wawancara pribadi. Malang
- Supangat. (2025, Agustus 21). Wawancara pribadi. Ponorogo.
- Suratman. (2025, Desember 26). Wawancara pribadi. Ponorogo.
- Tukiyem. (2025, Desember 19). Wawancara pribadi. Ponorogo.
- Yuli (2026 April 03). Wawancara pribadi. Malang.
- G. Sumber Daring**
- Andrianto, W. (2022). Catatan sederhana untuk Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang rekam medis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. <https://law.ui.ac.id/catatan-sederhana-untuk-permenkes-no-24-tahun-2022-tentang-rekam-medis-oleh-wahyu-andrianto-s-h-m-h/>
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara. (n.d.). Sejarah singkat keluarga berencana. <https://dp2kb.kukarkab.go.id/index.php/sejarah/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2025). Aktivitas atau aktifitas. <https://kbbi.web.id/aktivitas-atau-aktifitas>
- MacroTrends. (n.d.). Indonesia birth rate (1950–2025). <https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/idn/indonesia/birth-rate>
- Medscape. (n.d.). Contraception: Practice essentials, overview, periodic abstinence. <https://emedicine.medscape.com/>
- Oxford English Dictionary. (2026). Mantri. Oxford University Press.
- Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). (n.d.). Sejarah PKBI. <https://pkbi.or.id>
- Tim Penulis Sejarah GKJW Ponorogo & Mariyati. (2020). Youtube. https://youtu.be/XMpKmWV7T_I?si=DaJgIPiwsyW_fG8I